



# THE EFFECT OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS AND GOVERNMENT INTERNAL CONTROL SYSTEMS ON THE QUALITY OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS

Endang Darmawan

Universitas Widyatama, Bandung, Indonesia

[endangdarmawan@widyatama.ac.id](mailto:endangdarmawan@widyatama.ac.id)

## INFO ARTIKEL

### Histori Artikel :

Tgl. Masuk : 31 Oktober 2019

Tgl. Diterima : 01 Desember 2019

Tersedia Online : 23 Desember 2019

### Keywords:

*Implementation of Government Accounting Standards, Government Internal Control Systems, and Quality of Local Government Financial Statements.*

## ABSTRAK/ABSTRACT

*This study aims to determine how the influence of the adoption of government accounting standards and internal control systems of the government on the quality of local government financial reports on the SKPD in Bandung. The research method used in this study is the explanatory method. The results showed that partially and simultaneously the application of government accounting standards and the government's internal control system affected the quality of local government financial reports.*

## PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar ini dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD. Laporan keuangan pemerintah daerah (pemda) harus disusun berdasarkan sistem pengendalian intern (SPI) seperti yang diamanatkan dalam pasal 56 ayat (4) UU nomor 01 tahun 2004. Pada tahun 2010 Pemerintah menetapkan Peraturan

Pemerintah (PP) yang mengatur Sistem Pengendalian Intern baru ditetapkan pada tahun 2008 yaitu PP nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Bagi pemerintah daerah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas. Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah berkualitas yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

## KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah<sup>(3)</sup>. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia”.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menyatakan bahwa:

“Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ( SPIP) adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah”. Sistem Pengendalian Internal terdiri dari beberapa unsur yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan mencakup: relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami

## METODOLOGI PENELITIAN

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Laporan Keuangan Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 01 paragraf 9 menyatakan tujuan umum Laporan Keuangan yaitu: “Tujuan umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji t (parsial) diperoleh nilai signifikansi variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan sebesar  $0,000 < 0,05$  (taraf nyata signifikansi penelitian). Dari hasil perbandingan antara  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  yang menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 8,303, sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 1,991. Dari hasil tersebut terlihat bahwa

$t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $8,303 > 1,991$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  diterima, artinya secara parsial variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sedangkan untuk variabel sistem pengendalian internal pemerintahan sebesar  $0,000 < 0,05$  (taraf nyata signifikansi penelitian). dari hasil perbandingan antara  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  yang menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $7,937$ , sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar  $1,991$ . Dari hasil tersebut terlihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $7,937 > 1,991$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  diterima artinya secara parsial variabel sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil pengujian hipotesis (uji F) didapat nilai signifikansi secara simultan sebesar  $0,000$ , nilai ini lebih kecil dari *significance level*  $0,05$ . Dari hasil perbandingan antara  $F_{hitung}$  dan  $F_{tabel}$  yang menunjukkan nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $116,827$  sedangkan  $F_{tabel}$  sebesar  $3,11$ . Dari hasil tersebut terlihat bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $116,827 > 3,11$ , maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal pemerintahan berpengaruh terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## KESIMPULAN

Standar akuntansi pemerintah merupakan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan laporan keuangan Pemerintah pusat dan daerah Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penerapan standar akuntansi pemerintahan adalah salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam proses akuntansi terutama dalam menciptakan kendalan laporan keuangan.

Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan pemahaman kepada setiap pegawai di instansi pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan dan menindak tegas pegawai yang melanggar atau tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah.

## REFERENCES

- Adhi, Daniel Kartika dan Yohanes Suhardjo. 2013. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan studi kasus pada pemerintahan kota Tual*. Jurnal STIE SEMARANG Vol.5 No.3.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Herawati, Tuti. 2014. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan survey pada Organisasi perangkat daerah Pemda Cianjur*. Jurnal *Study&Accounting Research* Vol.XI No.1.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.